

**Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Temanggung)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)

Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

SELLA NANIA AMIN

NIM. 1502056029

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Ekslembar
Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Sella Nania Amin
Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan menadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Sella Nania Amin
NIM : 1502056029
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (studi Kasus Di Pengadilan Agama Temanggung)"

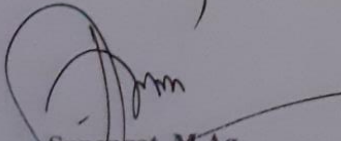
Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.

Demikian Harap Menjadi Maklum

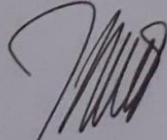
Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 8Maret 2020

Pembimbing I


Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

Pembimbing II


Hj. Nur Hidayati Setivani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

BERITA ACARA (PENGESAHAN
DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Sella Nania Amin
NIM : 1502056029
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus PA Temanggung Tahun 2016 – 2017)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. (Penguji 1)
2. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. (Penguji 2)
3. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 3)
4. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~* dengan nilai: 3,55 (B+).

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



ALI IMRON

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



BRILIYAN ERNA WATI

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج
لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS at-Thalaq:7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran, serta segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Ayahanda tercinta Faisal Amin (Alm) terimakasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan memberikan rasa rindu yang berarti.
2. Ibuku Nanik Rahayu terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga tidak mungkin terbalaskan hanya dengan selebar tulisan persembahan. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
3. Sahabat-sahabatku yang mengisi warna warni dalam perjalanan hidup penulis.

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sella Nania Amin

NIM : 1502056029

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Temanggung)”. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 10 Maret 2020

Deklarator,



Sella Nania Amin

NIM. 1502056029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zettitik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	tetitik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zettitik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	komaterbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Biladimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki alafaslanya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنعة ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

ـَـ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

____(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yāmati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + waumati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'insyakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوالفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia utuh. Anak sangat berhak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah dan biaya pendidikan anak tersebut. Bila mana kedua orang tua bercerai yang menjadi permasalahan adalah menyangkut hak asuhan anak, hak nafkah anak dan hak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Dari latar belakang di atas maka penulis membahas bagaimana implementasi putusan hakim terkait pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian dan bagaimana tinjauan hukum terhadap implementasi putusan hakim terkait pemenuhan hak anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Temanggung.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum non doktriner. Suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam martani nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Kajian penelitian hukum non doktriner difokuskan pada kajian hukum empiris yang sumber datanya berupa data primer dan data sekunder.

Perceraian tidak menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam pemeliharaan anak. Anak yang belum mumayyis berada dalam asuhan ibunya, sedangkan ayah bertanggung jawab dalam hal pembiayaan. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak pascaperceraian ialah, dilihat dari kemampuan ekonominya. Penentuan hak asuhan anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak pascaperceraian yaitu kasih sayang antar kedua orang tuanya dan dalam hal pembiayaan hidup bagian anak meliputi pendidikan dan segalabentuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.

Keyword : Pemenuhan Hak Anak, Perceraian, Hadhanah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabil ‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Temanggung)”. Sholawat dan salamsemogatetapterlimpahkankepadabagindaRasulullah Muhammad SAW yang senantiasamemupuk rasa semangat dan keyakinankepadapenulisdalammenyelesaikanskripsiini.

Terselesaikannyaskripsiinitidakterlepasdaribantuanbanyakpihak, sehingga pada kesempataninidengansegalakerendahanhati dan penuh rasa hormatpenulismenghaturkanterimakasihbagisemuapihak yang telahmemberikanbantuanmorilmaupunmaterilbaiklangsungmaupuntidaklangsungdalampenyusunanskripsiinihinggaselesai, terutamakepada yang sayahormati :

1. Supangat, M.Ag dan Hj. Nur Hidayati Setiyani, S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, yang selalu bersedia membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan dalam penulisan skripsi.

2. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. NovitaDewiMasyitoh, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Drs. Moh. Mukti Kepala Pengadilan Agama Temanggung yang telah berkenan memberikan ijin penulis untuk melakukan peneliatian.
5. Drs. Sunaryo, M.S.I selaku Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang telah bersedia untuk penulis wawancara, Staf Pengadilan Agama Temanggung dan para narasumber yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, Novita Dewi Masyitoh, SH., MH., DR. H. Ja'far Baehaqi, MH., DR. H. Ali Imron, M.Ag., Saifudin MH., Ali Maskur, MH., Yayan M Royani, MH., yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.

8. Untuk Faizal, Feviani, Novida dan Yunda yang telah menemani penulis dalam proses pengambilan data dan teman berkeluh kesah dalam menyusun skripsi.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum 2015.
10. Untuk Fika, Sally dan Ririn yang memberikan kenangan terdahulu selama KKN.
11. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka memperbaiki skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu peradilan pidana anak.

Semarang, 10 Maret 2020

Penulis,

Sella Nania Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM	

A. Anak dan Hak Anak	
1. Pengertian Anak	16
2. Hak-Hak Anak	19
B. Pengertian Perceraian.....	27
C. Akibat-Akibat Hukum Perceraian	
1. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perkawinan.....	30
D. Hadhanah	
1. Pengertian Hadhanah	33

BAB III Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Temanggung.....	39
B. Implementasi Hak-Hak Anak Akibat Perceraian	46
1. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.TMG.....	48
2. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.TMG.....	52
3. Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2018/PA.TMG.....	54
4. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2018/PA.TMG.....	56
5. Putusan Nomor 0916/Pdt.G/2018/PA.TMG.....	59

BAB IV Analisis Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian

di Pengadilan Agama Temanggung

A. Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama

Temanggung Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian 62

B. Tinjauan Hukum Terkait Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama

Temanggung Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat

Perceraian.....69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran..... 77

C. Daftar Pustaka 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian sebagai suatu peristiwa hukum yang secara faktual banyak terjadi dalam masyarakat tentunya menimbulkan akibat hukum, baik terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri, maupun kedudukan hak, dan kewajiban anak, bahkan status hak, dan kewajiban atas harta bersama yang telah mereka peroleh dalam perkawinan. Perselisihan yang tidak dapat lagi dipertahankan membutuhkan hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yang secara fungsional harus mampu mencegah atau mempersukar terjadinya perceraian, dan jika terjadinya perceraian itu tidak dapat dihindarkan lagi, maka harus dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri serta anak-anak dan harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan mereka.¹

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan. Banyak perintah Allah SWT dan Rasulullah yang mengacu atau menghususkan perihal kebahagiaan dalam suatu kehidupan perkawinan. Banyak pula larangan Allah dan Rasul

¹ Muhammad Syaifudin, sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta, Sinar Grafika ; 2016), hlm 62-63

perihal perceraian atau berakhirnya rumah tangga.² Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai sesama lain dan lain sebagainya.³

Undang-Undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan adalah UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perceraian secara garis besar, bagi yang non-muslim maka peraturan tata caranya berpedoman pada UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengatur detail detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai mengatur tata cara perceraian secara praktik.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut :⁴

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)

² Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1994, hlm. 14

³ Muhammad Syaifudin, *hukum perceraian*, hlm 21

⁴ *Ibid.* 19-20

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dilahirkan hidup sehingga anak tersebut mempunyai hak yang paling mendasar, tak seorangpun dapat merampas hak anak itu. Hubungan anak dengan orang tuanya menurut hukum adat sangat dipengaruhi dari struktur genealogis atau menurut asal keturunan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Setiap anak yang lahir pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun, dalam beberapa kesempatan perseteruan yang dihasilkan dari orang tuanya menjadikan anak sebagai korban. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang merumuskan hak-hak anak sebagai berikut ;⁵

⁵Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai mdengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hak semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang termasuk hak asuhan adalah mengenai hak asuh orang tua terhadap anak saja dan tidak berhubungan dengan harta kekayaan yang merupakan hak anak. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai istilah kekuasaan orang tua yang mempunyai arti lebih luas, dimana kekuasaan orang tua mencakup hak dan kewajiban anak yang berhubungan dengan harta kekayaan atau warisan, jadi disini mencakup tidak hanya anak saja yang kuthak asuh orang tua, tetapi juga pemeliharaan orang tua terhadap anak.

Hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban, memelihara dan mendidik anak adalah Bapak sedangkan Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Dalam hukum Islam hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberikan nafkah, menyusukan (*irdha'*),

dan mengasuh (*hadhanah*), dan dari segi material yaitu curah kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.⁶

Hadhanah (pengasuhan), menurut Muhammad Thalib, merupakan hak bagian anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Itulah yang berkewajiban melakukan *hadhanah* ini karena Rasulullah bersabda : “Engkau lebih berhak kepadanya (anak)”. Ibu-Bapak menurut agama Islam tidak saja mempunyai kewajiban memberimakan dan minum kepada anak-anaknya, tetapi juga lingkungan pendidikan, dan pembinaan akhlak wajib di perhatikan.⁷

Pemeliharaan atau pengasuhan anak berlakudua unsur yang terjadi dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *Hadhim* dan anak yang diasuh disebut *Maadhum*. Syarat anak yang akan diasuh adalah :⁸

- a. Ia masih dalam usia kanak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna.

Pencabutan hak asuh tidak berarti menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai, memelihara, dan melindungi anak. Dalam kenyataannya, orang tua yang

⁶Muhammad Syariffudin, hlm. 361

⁷ *Ibid*, 361

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2006), hlm. 81-82

dicabut kuasanya sehingga ternyata tidak mau menjalankan kewajibannya.

Maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:⁹

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Hak asasi anak di perlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan bergantung kepada orang lain dan memerlukan perlakuan khusus baik gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, dan bebas dari rasa khawatir maupun kesejahteraan.¹⁰

Kabupaten Temanggung memiliki penduduk sebanyak 752.486 jiwa, sebagian besar mata pencaharian penduduknya masih didominasi oleh sektor pertanian. Di beberapa daerah sebagian besar penduduknya adalah petani tembakau karena jika

⁹Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), hlm. 1

Temanggung dikenal sebagai Kota Tembakau. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 1462 perkara perceraian diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Temanggung sepanjang tahun 2016 yang terdiri dari cerai talak 450 perkara dan cerai gugat 1012 perkara.¹¹ Persoalan ekonomi bukanlah hanya menjadi pemicu tetapi faktor seperti usia, mata usaha sudah tidak lagi bertanggung jawab, menjalinkasi dengan yang lain dan kurangnya komitmen dalam menjalankan pernikahan.

Putusan Hakim mengenai hak asuhan kadang bukan menjadi solusi yang diinginkan. Dimana banyak terjadi pertentangan dari kedua pihak mengenai hak asuhan anak. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini berusaha mengadakan keseragaman peraturan tentang perwalian seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 50 s/d Pasal 54 mengenai tata cara menentukan siapa yang dapat menjadi wali dan bagaimanakah cara menentukannya. Hanya saja di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengaturan mengenai perwalian sangat sederhana, sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

B. Rumusan masalah

¹¹ <http://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201701/3674/1462-kasus-perceraian-diputus.html>

1. Bagaimana implementasi putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung terkait perlindungan anak akibat perceraian.
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap implementasi putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung terkait perlindungan anak akibat perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam Penulisan Hukum ini adalah:

1. Tujuan Umum:

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan proses belajar pada tingkatan sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo.

2. Tujuan Khusus:

Untuk mengetahui implementasi putusan Hakim terkait perlindungan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Temanggung.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pengayaan materi mengenai implementasi putusan Hakim dalam melindungi perlindungan anak akibat perceraian. Penulis juga

mengharapkan agar hasil yang didapat dari Penulisan Hukum ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan ilmu hukum acara, terutama hukum acara perdata, sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para *stakeholder* hukum di Indonesia, utamanya dalam pelaksanaan putusan Hakim terkait perlindungan anak akibat perceraian.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain ;

1. Skripsi Farhan yang berjudul *Penelantara Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*.¹²

Skripsi ini membahas tentang penelantaran anak dan dampak buruk

¹² Farhan yang berjudul “*Penelantara Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2009)

terhadap anak ditinjau dari hukum islam dan UU No 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, serta sanksi bagi pelaku penelantaran anak.

2. Tesis Achmad Zaki Zamami yang berjudul Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta.¹³ Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya dan nasib anak dimata hukum negara. Metode yang digunakan dalam tesis ini yaitu dengan pendekatan yuridid empiris.
3. Skripsi Nurul Alvianti Aguswulansari yang berjudul Tingginya Angka Perceraian di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Pada Musim Tembakau.¹⁴ Skripsi ini membahas faktor yang mengakibatkan tingginya angka perceraian di Temanggung khususnya Desa Kedu. Sedangkan penyusun mebahas akibat atau dampak perceraian bagi anak di Pengadilan Agama Temanggung.
4. Skripsi Adhita Anggun Sestyo Putri yang berjudul Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama

¹³ AchmadZakiZamami yang berjudul “AspekPerlindungan Anak PascaPerceraianBerdasarkanAnalisisPutusanPengadilan Agama Di Jakarta”, *TesisFakultasHukumUniversitas Indonesia*, (Depok, 2012)

¹⁴Skripsi Nurul AlviantiAguswulansari yang berjudul “Tingginya Angka Perceraian di DesaKeduKecamatanKeduKabupatenTemanggung Pada MusimTembakau”, *SkripsiFakultasSosial dan HumanioraUinSunanKalijaga*, (Yogyakarta, 2015)

Kota Semarang.¹⁵ Skripsi ini membahas penetapan pemeliharaan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif diskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

5. Jurnal Rahmadi Indra Tektana yang berjudul *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak korban perceraian. Penetapan Pengadilan hanya sebagai bukti kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi kepentingan anak-anak dan pihak yang ditunjuk sebagai walinya.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan dengan topik ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat penting mengenai pemenuhan hak-hak anak akibat perceraian sangat penting mengingat masih kurang optimalnya implementasi putusan Hakim.

F. Metode Penelitian

Metode yang

digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum non doktriner. Kajian penelitian

¹⁵ Adhita Anggun Sestyo Putri yang berjudul “Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Semarang”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, (Semarang, 2011)

¹⁶ Rahmadi Indra Tektana yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”, *Jurnal Muwazah* Vol.4, No. 1, Juli 2012

hukum non doktriner difokuskan pada kajian hukum empiris yang sumber datanya berupa data primer dan data sekunder.¹⁷

2) Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber data

1. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Temanggung.
2. Data sekunder adalah data yang menjadi pendukung dalam penelitian yaitu buku yang berkaitan dengan masalah tersebut.¹⁸

b. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan peoman penelitian.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai hukum primer.

¹⁷ PedomanPenulisanSkripsi Program SarjanaFakultas Syariah dan Hukum UIN WALISONGO Semarang. Hal 8

¹⁸SyaifudinAzwar, *MetodologiPenelitian*, Yogyakarta : PustakaPelajar Offset, 2001, Cet. III, hlm. 91

3) Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan

metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (interview).

Wawancara (interview) adalah proses wawancara langsung pada obyek yang menjadi tujuan penelitian yaitu dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Temanggung. Interview merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis yang dijadikan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹⁹ Dokumen tersebut berupa daftar perkara Perdata, putusan perkara perdata Pengadilan Agama Temanggung.

4) Metode Analisis Data

Dalam Penulisan Hukum ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan aspek-aspek yang menyangkut implementasi putusan Hakim dalam menangani perkara perdata (perceraian). Data tersebut kemudian akan

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII, hlm. 161.

dilengkapi dengan data primer yang akan diolah dengan metode analisis kualitatif untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah perlindungan anak akibat perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan mengenai anak, hak-hak anak, perceraian dan hadhonah.

Bab ketiga berisi tentang laporan hasil penelitian berisi tentang ruang lingkup Pengadilan Agama Temanggung, dan implementasi putusan hakim dalam menangani perkara perceraian.

Bab keempat merupakan Analisis implementasi putusan hakim Pengadilan Agama Temanggung.

Bab Kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

Demikian merupakan gambaran sistematika yang akan diterapkan di dalam penulisan penelitian skripsi ini. semoga dapat bermanfaat bagi penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian

A. Anak dan Hak-Hak Anak

1. Pengertian Anak

Secara bahasa anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.²⁰ Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.²¹ Dari aspek agama terutama agama Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil' alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam dalam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang lahir harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amanah yang diterima oleh orang tua, masyarakat bangsa dan negara.²²

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam* (cet.4), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 44

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 81

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014), hlm. 44

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orang tua. Sebagai amanah tentu anak tersebut harus dijaga dan diperhatikan kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya karena para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban berkenaan dengan anugerah yang telah diberikan kepadanya. Anak juga dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dimasa mendatang. Oleh karena itu anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²³

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan

²³ Abdul AzisDahlan, *EnsiklopediHukum Islam*, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996), hlm 112.

nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.²⁴

Sedangkandalampengertiansehari-hari yang dimaksuddengananakadalah yang belummencapaiusia tertentuataubelumkawin, pengertianiniseringkalidipakaisebagaipedomanumum. Pengertian anak menurut perundangan yang ada di Indonesia cukup beragam antara lain ;

- a. Anak menurutketentuanumumPasal 1 angka 2 Undang-undangNomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan Anak disebutkanbahwaanakadalahseorang yang belummencapaiumur 21 (duapuluhsatu) tahun dan belumkawin.
- b. Anak menurutUndang-UndangNomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak dinyatakanbahwaanakadalah orang yang dalamperkaraanaknakaltelahmencapaiumur 18 (delapanbelas) tahun dan belumpernahkawin.
- c. Anak menurutUndang-UndangNomor35Tahun 2014tentangPerlindungan Anak dinyatakanbahwaanakadalahseorang yang belumberusia 18 (delapanbelas) tahunbaikanak yang masihberadadalamkandungan.

²⁴D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.

- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- e. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Pada Pasal

45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

- f. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur dua puluh satu tahun.
- g. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁵

Anak juga dikatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi mudapenerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunya ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa mendatang. Oleh

²⁵Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

karena itu anak kelak mampu memiliki tanggung jawab tersebut, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknyaser ta adanya perlakuan padiskriminasi.

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajibanyaitumelindungi(*to protect*), memenuhi(*to fulfill*), dan menghormati(*to respect*)hak-hak anak. ²⁶ Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. ²⁷ Sedangkan pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua di jelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

²⁶ Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (Menteri Sosial, 2010), hlm. 11.

²⁷ Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 35 Tahun 2014

Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudaranya, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁸

- a) Prinsip non diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni :
 “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain,

²⁸Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 2

asal-usulkebangsaan, etnikatausosial, status kepemilikan, cacatatautidak, kelahiranatau status lainnyabaikdarisianaksendiriataudari orang tuaatauwalinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara pesertaakanmengambilsemualangkah yang perluuntukmenjamin agar anakdilindungidarisemuabentukdiskriminasiatauhukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakanataukeyakinandari orang tuaanak, walinya yang sahatauanggotakeluarga”. (Ayat 2).

- b) Prinsip yang terbaikbagianak (*best interest of the child*). Yaitubahwadalamsemuatindakan yang menyangkutanak yang dilakukan oleh lembaga-lembagakesajahteraansosialpemerintahatau badan legislatif. Makadariitu, kepentingan yang terbaikbagianakharusmenjadipertimbanganutama (Pasal 3 ayat 1).
- c) Prinsipatashakhidup, kelangsungan dan perkembangan(*the rights to life, survival and development*). Yaknibahwa negara-negara pesertamengakuibahwasetiapanakmemilikihak yang melekatataskehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara

peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2)

- d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu:

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

1. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini merupakan serapan dari KHA dan norma hukum nasional. Hak-hak dan kewajiban anak secara terperinci tercantum dalam Pasal 4 sampai Pasal 19, sebagai berikut :

- a. Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Pasal 5 menjelaskan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pasal 7 bahwa (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagian anak dirujuk dalam Pasal 24 dan 25 KHA.
- f. Pasal 9
 - a) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
 - b) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
 - c) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Pasal 10 menyebutkan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangannya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangannya.
- i. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan antara kesejahteraan sosial.

- j. Pasal 13 setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- k. Pasal 14 menjelaskan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan anak tetap berhak:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya.
 - b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d) Memperoleh Hak Anak lainnya.
- l. Pasal 15 mengatur setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibat dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibat dalam kerusuhan sosial
 - d) Pelibat dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e) Pelibat dalam peperangan dan
 - f) Kejahatan seksual.
- m. Pasal 16
 - 1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan penyiwaan, ataupun jatuhnya hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 3. Penangkapan, penahanan, atau tindakan penjarahan hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- n. Pasal 17
 - 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak diarahasikan.
- o. Pasal 18 setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- p. Pasal 19 setiap anak berkewajiban untuk:
 - a) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 - c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama.

Secara garis besar hak-hak anak yang

dapat dikategorikan dalam empat kategori yaitu :²⁹

- 1) Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
- 2) Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun formal dan hak menikmati standar kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (*development rights*).
- 3) Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak dan keluarga dan perlindungan bagian anak pengungsi (*protection rights*).
- 4) Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).

2. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak

²⁹Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, t.t.), hlm 11.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut ;³⁰

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sebelum dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

3. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 45 mengatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

B. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³¹ Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum

³⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1990), hlm. 16-17

³¹ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990, hal 65

berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, putusnya perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Menurut pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena;³²

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Atas putusan Pengadilan.

Perceraian secara yuridis berarti putusnyaperkawinan yang mengakibatkan putusnyahubungan sebagai suami istri atau berhenti berlakunya (suami-istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Istilah perceraian menurut UU No.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian adanya ;³³

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun

1975, mencakup antara lain sebagai berikut :³⁴

³² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group ; 2016), hlm. 61

³³ Muhammad Syaifudin, sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta, Sinar Grafika ; 2016), hlm 16

³⁴ Ibid. 19-20

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36)

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai cara-cara perceraian sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, tetapi diatur lebih lanjut dalam

Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 19 UU No. 1

Tahun 1974 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal

41 disebutkan akibat putusnyaperkawinankarenaperceraianialah :³⁵

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak

³⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa; 1989), hlm. 42-43

- pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

C. Akibat-Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Akibat hukum perceraian diatur dalam Pasal 41 UU no. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:³⁶

- a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Akibat-akibat hukum perceraian yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak-hak manusia (HAM).

³⁶Muhammad Syaifudin, hlm 349

Akibat hukum perceraian yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁷

Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkahan anak. Secara lebih rinci, sebagai berikut ;³⁸

- a) Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusan perkawinan akibat adanya perceraian.
- b) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah).
- c) Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
- d) Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang mantan istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraian dilakukan.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang

³⁷ *Ibid.* 355

³⁸ *Ibid.* 372

tuanya putus. Sebaliknya, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Sedangkan dalam Pasal 47 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan anak yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum si anak tersebut diwakili oleh orang tuanya.³⁹

Kedudukan, hak dan kewajiban anak dalam keluarga atau rumah tangga menurut hukum Islam telah di positivisasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 106. Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam membebaskan tanggung jawab atas semua biaya penyusuan anak kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan di bebaskan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayah atau walinya. Berikutnya Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan orang tua untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang

³⁹ *Ibid*, 358-360

belum dewasa atau dibawah pengampuannya, dan
tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya,
kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan
yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian
yang ditimbulkan karena kesalahan dari kewajiban tersebut.⁴⁰

D. Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata *hidhanu* yang berarti lambung, dan menurut bahasa dapat diartikan meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau pangkuan. Pada ibu menyusui anaknya meletakkan anak tersebut di pangkuannya. Seakan-akan ibu saat ini melindungi dan memelihara anaknya.⁴¹ *Hadhanah* adalah pemeliharaan anak di bawah umur dan oleh orang tua atau lainnya termasuk penyelenggaraan pendidikan dan perlindungannya dari kemungkinan gangguan yang dapat menyakitinya. Pemeliharaan anak hukumnya wajib. Pemeliharaan dilakukan oleh kerabat anak itu sesuai dengan *hadhanah*. Mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapkan anak-anak tersebut pada marabahaya kebinasaan dan masa depan suram.⁴²

Firman Allah SWT :

⁴⁰ Ibid, 363-364

⁴¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 119

⁴² Ibid, 120

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفْوِ أَنْفُسِكُمْ أَهْلِيكُمْ مَتَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (Qs. At-Tahrim :6)

Pada ayat ini orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terpelihar dari api neraka, agar seluruh anggota keluarganya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, termasuk anggota keluarga di sini yakni anak.

Firman Allah SWT yang artinya :

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikannya dan pakaian kepada para ibu dengan cara mawar. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Qs. Al-Baqarah : 233)

Hukum kewajiban memelihara anak banyak pula kita jumpai di dalam hadis-hadis, demikian pula halnya perbelanjaan anak adalah tanggungan ayah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 tersebut di atas Allah memerintahkan supaya kita memelihara keluarga kita dari api neraka.

Memelihara keluarga kita dari api neraka berarti kita harus melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena

anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang beragama agar kelak diadapatterhindar dari siksaan api neraka.

Masalah hadana timbul karena terjadinya perceraian antara pasangan suami isteri. Misalnya karena suami menceraikan isterinya yang telah memberikan anak. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan yaitu :⁴³

- 1) Ibu lebih berhak terhadap pengasuhan selama ia belum menikah dengan orang ketiga. Menurut al-Dinasyiqy perempuan lebih patut memperoleh hak pengasuhan karena wanita lebih besar belas kasihnya, lebih teliti dalam mendidik dan lebih ulet dan tahan lama memelihara. Nenek dan Kakek jika tidak ada ibu dan ayah maka hukumnya adalah sama dengan ibu dan ayah. Pada prinsipnya hak asuh diutamakan kerabat yang paling dekat lebih dahulu.
- 2) Anak dibawah asuhan ibunya sampai berumur 7 tahun. Anak umur 7 tahun biasanya sudah bisa mandiri dan mengetahui mana yang baik mana yang tidak, terutama untuk dirinya. Anak mandiri misalnya makan, minum, buang air besar dan cebok mampu dilakukan sendiri tanpa menggantungkan dengan orang lain.
- 3) Memberikan kesempatan memilih kepada anak, anak yang diberi kesempatan memilih harus mengetahui sebab-sebab ia diberi kesempatan memilih itu. Umur 7 tahun dianggap sudah tahu. Apabila pada umur itu belum tahu sebab ia disuruh memilih diantara kedua orang tuanya, maka diundur waktunya sehingga ia betul-betul bisa mempertimbangkan siapa diantara keduanya yang menjamin masa depannya.

Hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian, menurut Kompilasi hukum Islam ;⁴⁴

- a. Pasal 105 a
Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

⁴³ H. Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang, CV Karya Abadi Jaya; 2015), hlm. 195-196

⁴⁴ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). Hal. 78

b. Pasal 105 c

- 1) Semuabiyapenyusunananak di pertanggungjawabankepadaayahnya. Apabilaayahnyatelahmeninggal dunia, makabiyapenyusunan di bebbankankepada orang yang berkewajibanmememberinafkahkepadaayahnyaatauwalinya.
- 2) Penyusunanuntuk paling lama duatahun, dan dapat di lakukanpenyapihandalam masa kurangduatahundenganpersetujuan ayah dan ibunya.

Ayah dan ibu yang berhakmengasuhanak,

harusmemenuhisyarat-syaratsebagaiberikut :⁴⁵

1. Berakal
2. Merdeka
3. Beragama islam apabila anak beragama islam karena ayahnya muslim;
4. Iffah yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan peanggaran larangan syara'; oang fasiq dilarang mengasuh anak.
5. Amanah yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.
6. Tidak bersuami bagi perempuan; dan
7. Bermukim.

Proses pemeliharaananak dan pendidikannyaakandapatberjalandenganbaik, jikakedua orang tuasalingbekerjasama dan salingmembantu.

Tentusajadapatdilakukandenganbaikjikakeluargatersebutbenar-benarkeluarga yang sakinah dan mawaddah. DalamPasal 156 KompilasiHukum Islam yang memuatketentuannormatif, sebagaiberikut;⁴⁶

- a. Anak yang belummummayisberhakmendapatkanhadhanahdariibunyaakecualibilaibunya telahmeninggal dunia, makakedudukannyadigantikan oleh wanita-wanitadalamgarislurusibunya, ayah,

⁴⁵Prof.Dr.H.AbdulHadi, hlm. 197-198

⁴⁶ Muhammad Syaiffudin, hlm 382

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ayah, saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.

- b. Anak yang sudah mumayyis berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c dan d tersebut.
- f. Pengadilan Agama dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

Ketentuan dalam kompilasi hukum islam,

tampak bahwa tanggung jawab sebagai orang

tuat tidak dapat gugur walaupun mereka sudah bercerai.

Ketika anak itu belum mumayyiz maka pemeliharaan ada pada ibunya namun biaya

di tanggung oleh ayahnya.

BAB III

Implementasi Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian

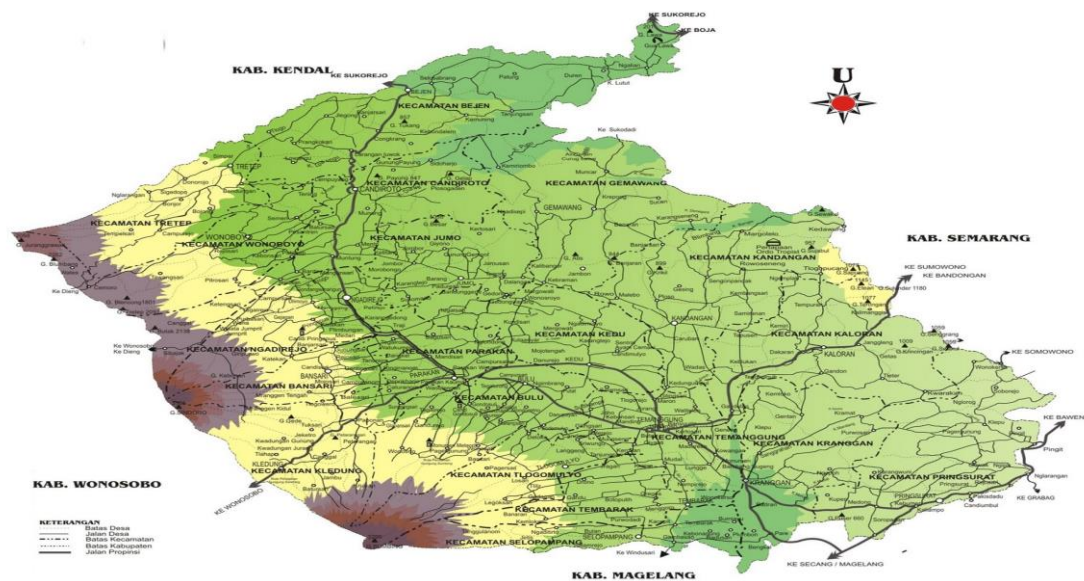
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Temanggung

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding.⁴⁷

Pengadilan Agama Temanggung dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (*Bepaling Betreffende De Priesterraden Op Java En Madura*) Tanggal 19 Januari 1882 dengan nama Raad Agama atau Penghulu

⁴⁷ <https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 18 November 2019

Landraad. Dengan adanya Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 ini, maka menjadi tonggak sejarah mulainya Yuridis Formal keberadaan Peradilan Agama Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya.⁴⁸



Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Temanggung

Pengadilan Agama Temanggung beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 3 Telp. (0293) 491161 Temanggung Kode Pos 56214 dengan Luas Tanah 1.020 M² dan Luas Gedung 695. Wilayah Pengadilan Agama Temanggung meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 20 Kecamatan, dan 289 Desa. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 745.778 dengan rincian 373.819 laki-laki dan 371.959 perempuan. Dengan wilayah hukum yang sedemikian luas dan jumlah penduduk yang

⁴⁸ <https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 18 November 2019

begitubanyak, Pengadilan Agama Temanggunghanyamemilikipegawai 21 orang. AdapunbeberapaKecamatan yang termasukalam wilayah tersebutakanpenyusunuraikansebagai berikut ;

1	KecamatanTemanggung	11	KecamatanGemawang
2	KecamatanTlogomulyo	12	KecamatanJumo
3	KecamatanKranggan	13	KecamatanKaloran
4	KecamatanKedu	14	KecamatanPringsurat
5	KecamatanNgadirejo	15	KecamatanTembarak
6	KecamatanParakan	16	KecamatanSelopampang
7	KecamatanBansari	17	KecamatanCandiroto
8	KecamatanKledung	18	KecamatanBejen
9	KecamatanBulu	19	KecamatanWonoboyo
10	KecamatanKandangan	20	KecamatanTretet

TabelKecamatan di wilayah Kab.Temanggung

Visi

TerwujudnyaPengadilan Agama Temanggung yang Agung

Misi :

1. Menjagakemandirian badan peradilan
2. Memberikanpelayananhukum yang berkeadilankepadamasyarakatpencairkeadilan
3. Tersedianyainformasipengadilan yang dapatdiakses oleh masyarakat
4. TerwujudnyaaparaPengadilan Agama Temanggung yang profesional, efektif, efesien dan akuntabel.

5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Temanggung yang jujur, bersih dan berwibawa.

Mengenai struktur organisasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Berikut struktur organisasi di Pengadilan Agama Temanggung ; Tabel struktur organisasi Pengadilan Agama Temanggung⁴⁹

⁴⁹<https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>.di akses pada tanggal 18 Noveber 2019

```

graph TD
    Ketua[Ketua  
Drs. Moh. Mukti  
Wakil Ketua  
Drs. Muhlis, S.H., M.H.] --- Sekretaris[Sekretaris  
Wasis Khasana, S.H.I.]
    Ketua --- Hakim[Hakim  
1. Drs. Sunaryo, M.S.I.  
2. Drs. Baridun, S.H.  
3. Drs. Asfuhah]
    Ketua --- Panitera[Panitera  
Mokhamed Miftah, S.Ag]
    Ketua --- WakilPanitera[Wakil Panitera  
Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.]
    Ketua --- KasubBagPerencanaan[Kasub Bag. Perencanaan  
TI dan Pelaporan  
Fathul Yasir Fuadi, S.Kom]
    Ketua --- KasubBagKepegawaian[Kasub Bag. Kepegawaian  
dan Ortala  
Asmiyati, S.T.]
    Ketua --- KasubBagUmum[Kasub Bag. Umum  
dan Keuangan  
-]
    Ketua --- JurusitaPenganti[Jurusita Penganti  
1. Suhesti Retnaningsih  
2. Susetyawan]
    Ketua --- PaniteraPenganti[Panitera Penganti  
1. Indri Astuti, S.H.  
2. Mei Wati, S.H.  
3. Munawwaroh, S.Ag.  
4. Heppy Rachmawati, S.H.  
5. Leni Vianita, S.H.  
6. M. Akbar Ariz P., S.H.]

```

No	JenisPerkara	Sisatahun 2017	TerimaTah un 2018	PutusTahu n 2018	SisaTahun 2018
1	IzinPoligami	3	7	10	0
2	CeraiTalak	72	474	489	57
3	CeraiGugat	139	1198	1182	155
4	Harta Bersama	1	3	4	0
5	Penguasaan Anak	0	2	2	0
6	Perwalian	0	3	3	0
7	AsalUsul Anak	0	5	5	0
8	Istbat Nikah	1	3	4	0
9	Dispensasi Nikah	2	130	132	0
10	WaliAdhol	1	2	3	0
11	Ekonomi Syariah	1	1	1	1
12	Kewarisan	0	4	3	1
13	PenetapanAhliWar is (P3HP)/ Kewarisan	1	2	3	0
14	Lain-lain	0	17	17	0

	Jumlah Total	221	1851	1858	214
--	---------------------	------------	-------------	-------------	------------

Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2018

Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Temanggung tahun 2018 sebanyak 2072 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2017 sebanyak 221 dan perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 1851 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus pada tahun 2018 sebanyak 1858 perkara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini ;⁵⁰

B. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Perceraian

Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Seorang anak yang menjadi korban perceraian tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orangtua khususnya.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Temanggung ketika memutuskan terkait hak asuh anak pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak dibawah umur kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 105 yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 Tahun maka diberikan kebebasan memilih

⁵⁰Laporan Tahunan Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2018

diasuh ayah atau ibunya. Akan tetapi hak asuh anak bisa diberikan kepada pihak ayah apabila ibunya memiliki kelakuan yang tidak baik serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu atau mendidik anaknya.⁵¹

Besaran biaya pemeliharaan anak harus mempertimbangkan dari segi kemampuan dan kecakapan, lebih ditekankan kebutuhan pokok terpenuhi terlebih dahulu agar kesejahteraan anak terlindungi. Dalam perkara cerai talak ada pembebanan biaya nafkah anak walaupun tidak ada permintaan. Hal ini berbeda dengan cerai gugat dimana harus ada permintaan mengenai hadhanah, kalau tidak ada permintaan maka pengadilan menganggap hal ini sudah di musyawarahkan oleh para pihak di luar sidang pengadilan.⁵² Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan terkait implementasi pemenuhan hak-hak anak setelah putusan yang ditetapkan oleh Hakim.

1. Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2018/PA.TMG

Pemohon Bapak Kanan dan Termohon Ibu Sri, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Setember 1998. Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Termohon. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2017

⁵¹Wawancara Bapak Sunaryo selaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung

⁵²Wawancara Bapak Sunaryo selaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak raji kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa ; 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
3. Menetapkan anak bernama Imam bin Kanan umur 19 tahun dan Ifak bin Kanan umur 11 Tahun berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan/hadonah Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri dengan memberikan hak akses bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anaknya melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahun sampai anak berumur 21 tahun atau menikah.

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dalam perkara ini suami mengajukan cerai talak kepada istri yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Temanggung. Dalam perkara ini istri mengajukan Rekonsensi (Gugatan Balik). Perkaratersebut pada pokoknya bahwa dalam perkara Rekonsensi ini untuk penyebutan para pihak semula disebut Pemohon dalam perkara Konpensis selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi dan untuk Termohon Konpensis selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi bersamaan dengan menyampaikan jawaban awal, maka gugatan Penggugat Rekonsensi telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 132 huruf b (ayat 1) HIR maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan harus dipertimbangkan.

Bahwa gugatan Penggugat salah satunya tuntutan untuk membayar nafkah 2 orang anak yang berumur 19 Tahun dan 11 Tahun sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dan tidak menyanggupi atas tuntutan Penggugat Rekonsensi.

Dikarenakan Tergugat Rekonsensi tidak mampu membayar biaya tersebut dan hanya sanggup membayar nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan

ayah”.⁵⁴ Dapat disimpulkan bahwa seorang ayah beralasan tidak dapat memenuhi hak-hak anaknya karena masalah ekonomi dan pihak mantan istri sudah menikah lagi.

2. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2018/PA.TMG

Pemohon Amin umur 34 Tahun, agama islam, pekerja anak karyawan swasta. Termohon Tri umur 35 Tahun, agama Islam, pekerja tidak bekerja. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 30 september 2005. Bahwa dalam perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmoni, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi. Maka Hakim mengadili ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama Denish, umur 2 tahun 6 bulan, minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau menikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

⁵⁴Wawancara Bapak Kanan

Dalam perkara ini suami mengajukan cerai talak kepada istrinya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Temanggung. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 30 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Magelang. Dalam perkara ini kedua yang telah dikaruniai seorang anak berumur 2 Tahun 6 Bulan dan selama 2 bulan terakhir Termohon sudah tidak hidup satu rumah dengan Pemohon. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 Majelis Hakim dapat menetapkan nafkahan anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagai mandiatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI dan dalam perkara *quo* berdasarkan keterangan Pemohon anak bernama Deni berumur 2 Tahun 6 Bulan berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 400.000,- setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak itu berumur 21 Tahun atau sudah menikah.

Dalam wawancara kepada Ibu Tri pihaknya mengatakan bahwa mantan suaminya memberikan nafkah sesuai dengan putusan Hakim. “Mantan suami kadang-kadang kesini cumangasih uang buatkan anak kadang sebulan

ekalkadangtelat juga
 ngasihnyatapisegitujelastidakcukupuntukkebutuhananak. Saya juga
 keepotanmengasuhanak, apalagisayaharusbekerja. Anak sayasekarang di
 asuhsimbah di Grabag”.⁵⁵ Sedangkanwawancara kepada Bapak Amin
 pihaknyamengatakan
 “sayakalaupulangkerjakadangmampirkeGrabagjenggunakanaktapiselaludilarang
 oleh mertua, kalauuntukkebutuhananaksayakasihtiapbulansekitarRp 400.000,-
 sampaidenganRp500.000,-. Penghasilansayasebagaikaryawanpabrik juga
 gajinyatidakseberapa”.⁵⁶

3. Putusan 1412/Pdt.G/2018/PA.TMG

PenggugatHerwanto, umur 29 tahun, agama islam,
 pekerjaanburuhharianlepas. TergugatFitriani, umur 23 tahun, agama islam,
 pekerjaanburuhharianlepas. BahwaPemohon dan
 Termohontelahmenikahsecarasah pada tanggal 21 September 2012.
 Bahwadalamperkawinan yang sah, PemohondnTermohontelahdikaruniai 1
 (satu) orang anak yang bernama Aliya umur 3 tahun, saatiniBERSAMA Termohon.
 Mengingatseuapasadalamperaturanperundang-undangan dan hukumislam
 yang berkaitandenganperkaraini, maka Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

⁵⁵Wawancara Ibu Tri

⁵⁶Wawancara Bapak Amin

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama Aliya umur 3 Tahun, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 Tahun atau menikah;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Suami mengajukan cerai talak, Penggugat Harwanto 29 Tahun dan
 Tergugat Fitriani 23 Tahun. Pemohon dan
 Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Kledung pada Tanggal 21 September 2012 dan
 telah dikaruniai seorang anak berumur 3 Tahun.
 Bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut,
 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula
 tidak ternyata bahwa tidak datang nyaitu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh
 karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan
 permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Menimbang,
 bahwa sesuai dengan Sema No. 04 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016
 Majelis Hakim secara *ex*
officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak ter
 sebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f)
 KHI, dan dalam perkara *aquo* berdasarkan keterangan Pemohon,
 anak tersebut bernama Aliya umur 3 (tiga) tahun,

berada dalam asuhan Termohon, dan
 Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp
 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10%
 setiap tahun hingga anak tersebut berumur 21 Tahun atau menikah.

Wawancara kepada Ibu Fitriani mengatakan pihaknya sudah tidak mau lagi
 bertemu dengan suaminya dan
 terkait biaya anak dirinya mampu membiayainya sendiri walaupun hanya bekerja
 sebagai buruh.

“terkadang mantan suami menitipkan uang kepada kerabat atau tetangga tetapi itu hanya
 berlangsung 3 bulan sekarang sudah tidak lagi memberikan biaya kepada anaknya.
 Saya juga
 sanggup biayai anak saya sendiri saya sudah tidak butuh bantuan mantan suami”.⁵⁷

Sedangkan saat wawancara kepada Bapak Harwantom mengatakan “
 saya sulit bertemu dengan anak saya sudah hampir 6 bulan tidak bertemu dan
 tidak diperbolehkan bertemu oleh mantan istrinya.
 Kalau mantan istrinya ke rumah saya pasti saya kasih tahu mantan istrinya sudah tidak
 mau bertemu dengan saya dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi”.⁵⁸

4. Putusan 1425/Pdt.G/2018/PA.TMG

⁵⁷Wawancara Ibu Fitriani

⁵⁸Wawancara Bapak Harwanto

Putusan tentang pengasuhan anak, Penggugat Sugiyarti 40

Tahun pekerjaan burumah tanggadengan ini melawan Muhyidin 48

Tahun pekerjaan Karyawan Swasta. Penggugat dan

Tergugat semula adalah suami istri yang sah namu saat ini status

perkawinannya antara Penggugat dan

Tergugat dinyatakan bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama

Temanggung tanggal 07 Agustus 2017 dalam sidang majelis hakim Pengadilan

Agama Temanggung Nomor 1192/Pdt.G/2016/PA.TMG.

Bahwa dalam perkawinannya yang sah telah dikaruniai seorang anak umur 15

Tahun dan dalam pengasuhan Tergugat.

Penggugat selalu rutin mengirim uang guna mencukupi kebutuhan anak tersebut,

namun selama bulan Januari 2017

anak tersebut ikut dalam pengasuhan Penggugat sampai saat ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan maka Majelis Hakim

menetapkan anak tersebut berada di bawah Hadlonah Penggugat.

Meskipun anak telah ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat,

namun Tergugat sebagai ayah kandung nyatetap berhak untuk bertemu dan

menyalurkan kasih sayang nyaterhadap anak tersebut semata-mata berdasarkan ke

pentingan terbaik dan kesejahteraan anak dan

Penggugat sebagai pemegang hak asuhan tidak boleh memutuskan jalinan komunikasi antara anak dengan Tergugat sebagai ayahnya.

Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat biaya Hadlona setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Satpam BRI, namun saksi tersebut tidak menyebutkan besaran penghasilan Tergugat, oleh karena itu Majelis menentukan biaya hadlona yang dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan keputusannya sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak berumur 21 Tahun atau menikah.

Wawancara kepada Ibu Sugiyarti mengatakan mantan suaminya sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban anaknya. “mantan suami saya sudah tidak pernah berkomunikasi kepada saya maupun anak saya, anak saya trauma bertemu ayahnya apalagi waktu tinggal bersama ayahnya selalu mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Untuk biaya anak saya sudah ditanggung suami saya sekarang, apalagi suami sangat sayang kepada anak saya dan

anaksayabisamerasakankasihsayang ayah

walaupunbukandariayahnyasendiri”.⁵⁹

Sedangkansaatpenelitibertemudengan Bapak

Muyidinpihaknyamenyatakankesulitanekonomi,

gajisatpamhanyacukupuntukkeperluannya. “Saya

bukannyatidakmaumembiayaitapisaya juga kesulitan dalam hakekonomi.

Mantanistri juga sudahmenikahsayasungkankalauharuskesana dan

ekonomimantanistricukupstabil dibandingkandenganpendapatansaya yang

kecil”.⁶⁰

5. Putusan 0916/Pdt.G/2018/PA.TMG

Putusanperceraianantara Bapak Sugiono dan IbuMisnah,

bahwaPemohon dan Termohontelahmenikahsecarasaah pada tanggal 10

November 1995. BahwadalampernikahanantaraPemohon dan

Termohontelahdikaruniai 2 orang anakberumur 21 Tahun dan 5 Tahun.

BahwaPemohon dan Termohontelahpisahrumahsejakawal 2015.

BahwaataspernyataanKetuaMajelisPemohonmenyatakanbahwaPemohonsang

gupakanmemberikannfkahkepadaanakPemohon dan Termohon yang bernama

Adnan umur 5 Tahun, minimal sejumlahRp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

setiapbulan, sampai anakberumur 21 Tahunataumenikah.

⁵⁹WawancaraIbuSugiyarti

⁶⁰Wawancara Bapak Muyidintanggal 16 November 2019

Menimbang bahwa nilai uang setiap tahun akan mengalami perubahan/penyusutan (inflasi) dan kebutuhan anak setiap tahun mengalami peningkatan, oleh karena itu besarnya beban yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon setiap tahunnya harus ditambah 10%. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vesrtek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Temanggung
4. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohn berupa nafkah 1 (satu) orang anak, umur 5 Tahun minimal sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Saat melakukan wawancara terhadap

Bapak

Sugiyono pihaknyamengatakan

“sayasudahtidakberkomukiasilagidenganmantanistri dan anak-anak, awalnya sayarutin kasihuan anak-anak setiap bulantetapisemenjaksayamenikah lagi, sayajadikerepotan dan banyakkebutuhan yang harussayautamakanterlebihdahulu. Kalaulebaran anak-anakkadangkesini. Biasanyakalaukesinisayakasihuangseadanya.

Kalauadauanglebihsayaingetanak-anaktapimerekajarangkesini”.⁶¹

⁶¹Wawancara Bapak Sugiyono pada Tanggal 24 November 2019

SedangkansaatmelakukanwawancaraterhadapIbuMisnahpihaknyamera sakewalahanmerawatanak-anakpalagipekerjaannyahanyasebagairuhtani yang tidakseberapa dan harusmenghidupikeduaanakny. “ mantansuamibiasanyakasihuangkeanak-anakkalaulebaran, kalaugalebaran juga gabakaldikasih. Untungnyaanaksaya yang besarsudahbekerjadibisabantuincukupinkebutuhanrumah dan kebutuhanadiknya”.⁶²

Perceraiantidakmenyebabkanhilangnyahak dan kewajibansebagai orang tuadalampemeliharaananak, semata-matauntukkesejahteraananak. Perceraianmenyebabkananak-anakdibawahumurberadadalamasuhanibunya, sedangkanbiayapemeliharaanakanmenjaditanggungjawabayahnya. Apabila ayah tidakmampuPengadilanakanmenentukanbahwaibuakanikutmemikulbiayapem eliharaantersebut.⁶³Sejauhiniangatjarangterjadi eksekusi di Pengadilan Agama Temanggung, sebagai Hakim hanyabisamemutussesuaidengantuntutanjikatidakadatuntutanmakadianggapsu dahmenyelesaikansecarakekeluargaan.

⁶²WawancaraIbuMisnah

⁶³Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim Pengadilan Agama Temanggung

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

A. Implementasi Putusan Hakim Terkait Pemenuhan Hak-Hak Anak

Akibat Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁶⁴ Pemenuhan hak-hak anak akan tetap melekat kepada kedua orangtua walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai. Namun, dalam kenyataannya masih ada beberapa yang belum menjalankan sesuai putusan yang telah ditetapkan oleh hakim

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Sebaliknya, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan imperatif bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, menurut Pasal

⁶⁴Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990, hal 65

47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, anak tersebut berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya. Sedangkan dalam Pasal 47 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan anak yang belum dewasa tidak cakap melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum keperdataan, sehingga perbuatan hukum si anak tersebut diwakili oleh orang tuanya.⁶⁵

Pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan dijatuhkannya Putusan. Namun dengan jatuhnya putusan belumlah selesai persoalannya. Putusan tersebut harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, karena suatu putusan tidaklah berarti apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan terkait hak anak seperti nafkah dan hak asuh dilakukan tanpa eksekusi atau secara sukarela. Jika eksekusi secara sukarela ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak yang kalah tidak dapat menjalankan putusan yang dijatuhkan padanya secara sukarela, maka pihak lain yang mendapatkan hak asuh dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh ibu yaitu, ibu bisa menegur atau

⁶⁵ Muhammad Syaifuddin, hlm.358-360

meminta kepada mantan suami secara baik-baik. Apabila mantan suami masih tetap tidak memperhatikan, maka mantan istri bisa mengajukan eksekusi. Namun sayangnya ketika para responden ditanya tentang pengajuan eksekusi, semua responden tidak ada yang mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama. Pada waktu ditanya tentang adanya upaya hukum yang bisa dilakukan kepada mantan suami, agar menjalankan putusan Pengadilan Agama. Tidak ada responden yang mengajukan upaya hukum, disebabkan pengetahuan responden sendiri tentang hukum yang begitu rendah. Sedangkan Pengadilan juga bersifat pasif, maka banyak disebabkan seorang mantan istri tidak tau tentang adanya eksekusi terhadap mantan suaminya. Seharusnya Pengadilan bisa bersifat aktif dalam adanya eksekusi tersebut. Sehingga mantan istri bisa menuntut mantan suami agar bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan putusan majelis hakim.

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, masih belum cukup umur, maka hadhanah merupakan solusinya dalam masalah ini. Hadanah adalah pemeliharaan anak di bawah umur dan oleh orang tua atau lainnya termasuk penyelenggaraan

pendidikan dan perlindungannya dari kemungkinan gangguan yang dapat menyakitinya.⁶⁶

Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari. Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa terkait hak anak haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat.

Namun yang terjadi perihal hak-hak anak pasca perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Temanggung semua hak asuh anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya dan hampir semua hak nafkah anak yang menanggung adalah ibu. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Penentuan hak asuh anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak pasca perceraian yaitu kasih sayang antara kedua orangtuanya dan dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala bentuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.

⁶⁶Djamaan Nur, hlm.120

Dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah penulis dapatkan, Pengadilan Agama Temanggung memutuskan mengenai biaya nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam huruf a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut juga sudah dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41, yang mewajibkan seorang ayah tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian. Namun dalam kenyataannya bertolak belakang dengan putusan majelis hakim. Ayah yang seharusnya menafkahi anak-anaknya, akan tetapi yang terjadi ayah tidak menjalankan putusan tersebut.

Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak pasca perceraian ialah, dilihat dari kemampuan ekonominya. Dalam memutuskan perkara hakim memberi beban pembuktian kepada istri, dalam pembuktian adakalanya menghadirkan saksi-saksi tentang pekerjaan dan penghasilan suami, ada juga bukti tertulis yaitu berupa slip gaji atau keterangan gaji dari bendahara dia bekerja.⁶⁷

Pemenuhan hak-hak anak akan tetap melekat kepada kedua orangtua walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai. Namun, dalam kenyataannya

⁶⁷Wawancara Bapak Sunaryoselaku Hakim di Pengadilan Agama Temnaggung

masih ada beberapa yang belum menjalankan sesuai putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Adapun faktor yang sering dialami oleh orang tua terkait pemenuhan hak-hak anak yaitu ;⁶⁸

1. Faktorkomunikasi

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anaknya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena akibat terjadinya perceraian, secara tidak langsung anaklah yang akan menjadi korban. Hal ini secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama.

Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Namun sangat di sayangkan realita yang terjadi, masih ada seorang ayah yang lalai dengan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan kebutuhan sehari-hari si anak. Setelah terjadinya perceraian komunikasi terhadap anak-anaknya juga terputus. Sehingga dekatkan seorang ayah

⁶⁸Wawancara Bapak Sunaryo selaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung

terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi,
seorang anak lebih cenderung dengan ibunya.

Putusny komunikasi menyebabkan putusnyatalisilaturahmi diantarakeduan
ya.

2. Faktor ekonomi

Permasalahan biaya nafkahanak setelah orang tua bercerai adalah hal yang
sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Setelah
terjadinyaperceraian anak selalumenjadi korban,
sedangkan anak tidak bersalah atas perceraian kedua orang tuanya.

Jika diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
maupun hukum Islam,

bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkahanak setelah terjadinya perceraian
pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki.

Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian nafkahanak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang
menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajiban tetap melekat dan
harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Putusan Hakim Pengadilan Agama Temanggung Terkait Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Namun,

apabila terjadi sengketa mengenai hak-hak anak ketika perkawinan putus karena perceraian Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas dan tegas. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnyaperkawinankarena perceraian ialah

,⁶⁹

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 41 lebih mengfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab materil yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu.

Jadi dengan adanya perceraian, ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974

tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga

⁶⁹Pasal 41 Undang-Undang Nomer 1 Tentang Perkawinan

dipahamibahwaketikaanakmasihbelumbaligh,
makapemeliharaananakmerupakanhakibu,
namunbiayanafkahnyamenjaditanggungjawabayahnya.

Dengandemikianmeskipunusiaanakbelumbaligh dan
pemeliharaannyaberadadalamnaunganibu, akantetapisegala yang
menyangkutbiayasepenuhnyatanggunjawabayahnya.

Salah

satuakibathukumdariterjadinyaperceraianadalahmengenaihak-hakanak yang
dilahirkan selamaperkawinan. Dalamketentuan umum Pasal 1 huruf g
Kompilasi Hukum Islam,
menganaimasalahHakanaksebagaiakibatputusnyaperkawinankarenaperceraian
lebihdikenaldenganistilah*Hadhanah*yaitukegiatanmengasuh, memelihara dan
mendidikanak hinggadewasa ataumampuberdirisendiri.

Mengenaimasalahhadhonahtelahdiatursecararinci di dalam Pasal 105

Kompilasi Hukum Islam, yaitu :⁷⁰

Dalam hal terjadinyaperceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁷⁰Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Nuansa Aulia;2012), hlm. 44

Meskipun ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan secara otomatis perihal *Hadhonah* anak yang belum *mumayyiz* jatuh ketangan Ibu, namun ketentuan ini tidak diberlakukan secara mutlak, apabila dari pihak bapak menghendaki hak asuh anak. Hakim dapat memberikan hak *hadhonah* itu kepada bapak disertai dengan alasan-alasan yang menguatkan untuk menggurkan hak asuh ibu. Misal ibu berakhlak buruk, cacat moral atau cacat mental. Pada prinsipnya selagi utamakan kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak. Penentuan pemberian hak *Hadhonah* ini kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan anak. Untuk mengukur dan mengklarifikasi terwujud atau tidaknya kemaslahatan anak maka harus memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan orang yang mengasuh dan memelihara tersebut.⁷¹

Hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya. Pertama, dalam soal kehidupan masyarakat, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. Kedua, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan

⁷¹Wawancara dengan Bapak Sunaro Hakim Pengadilan Agama Temanggung

lebih tah dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain.

Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun, karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantunya untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai Sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa memelihar dirinya.

Dalam hal ini lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan.⁷²

Hakim dapat meminta keterangan dari sang anak itu sendiri mengenai keinginan apakah ingin ikut bapak atau ibunya.

Ketika anak sudah berumur 12 Tahun, dia telah dikatakan mumayyiz sehingga dianggap telah cakap dan telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk.⁷³ Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak ;

“Setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi penngembangandirinyasesuaidengannilai-niaikesusilaan dan kepatutan.”

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagian anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

⁷²Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), hlm. 247

⁷³Wawancara Bapak Sunaryo selaku Hakim Pengadilan Agama Temanggung

Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa :
 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁴ Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai hak-hak anak ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam beberapa Pasalnya, sebagai berikut;

Di dalam Pasal 4, ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Di dalam Pasal 7 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kemudian dalam Pasal 14 Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

⁷⁴Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Di dalam Pasal 9 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
3. Di dalam Pasal 13, ditegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan pelakuan salah lainnya.

Faktor komunikasi

dan

ekonomi selalu menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak anak. Setelah

melakukan wawancara dengan beberapa responden masih ada para pihak yang

mengabaikan pemenuhan hak anak,

bukan hanya hak dalam nafkah tapi hak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua

orang tuanya. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang

ada, dimana hak-hak anak yang belum cukup umur masih melekat di antara kedua

orang tuanya. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang

tuanya dalam mengasuh dan mendidik anaknya. Seorang anak yang menjadi korban

perceraian tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan

kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebut dalam pasal 9

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa : orang tua adalah

yang

pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani

ni, jasmanimaupun sosial. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 52 menyatakan:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.

Kewajiban dan

tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak menurut Pasal 20

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dilakukan oleh negara, pemerintah,

masyarakat, keluarga dan orang tua. dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 menegaskan bahwa negara dan

pemerintah menjamin serta mengawasi penyelenggaraan terhadap perlindungan,

pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban

orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Orang tua adalah yang

pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak,

baik secara jasmaniah maupun rohani.

Tanggung jawab ini mengandung kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak sed

emikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang

cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua,

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan

berkemauan sertaberkemampuan untuk meneruskancita-citabangsa berdasarkan pancasila.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, selain mempunyai hak atas pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, ia juga mempunyai hak untuk menuntut orang tua jika melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, ditempat diadakannya sidang perceraian dahulu. Orang tua yang tidak melaksanakan putusan hakim untuk: tetap menafkahi anaknya, maka dapat dikenakan sanksi yaitu yang dinamakan dengan sita eksekusi.
2. Seorang anak yang menjadi korban perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Selain itu anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dari keluarga dan orang tua pada khususnya. Orang tua dalam hal ini mempunyai kewajiban atas kehidupan si anak. Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Saran.

Hendaknya setiap orang tua yang telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memberikan sarana baik yang bersifat materiil yaitu biaya pendidikan dan pemeliharaan fisik maupun yang sifatnya imateriil yaitu perhatian, kasih sayang dan motivasi dalam hidup anak, karena anak adalah masa depan bangsa, jadi anak harus di didik dengan baik. Sehingga dalam hal ini dengan adanya perceraian orang tua, seorang anak tetap mempunyai hak atas pemeliharaan, perlindungan dan pendidikan yang dibutuhkan seorang anak.

Daftar Pustaka

Abdul AzisDahlan, *EnsiklopediHukum Islam*, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996)

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok- pokokHukumPerdata*,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2000)

Abdussalam, *HukumPerlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007)

Ahmad ZuhdiMuhdlor, *MemahamiHukumPerkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Bandung: Al Bayan, 1994

Amir Syariffudin, *UshulFiqihJilid 1* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014)

Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika 2006),

D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Kencana, 2012),

Djamaan Nur, *FiqhMunakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993)

DjumairiAchmad, *HukumPerdata II.DosenFakultasSyari'ahIAINWalisongo* Semarang, 1990,

<https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Irma SetyowatiSoemitro, *AspekHukumPerlindungan Anak*, (Jakarta;BumiAksara, 1990)

Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*,

(Menteri Sosial, 2010)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. XVIII,

Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi*

PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga (Jakarta: KPAI,

t.t.,)

Muhammad Syaifudin, sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*(

Jakarta, Sinar Grafika ; 2016)

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group ;

2016),

Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN

WALISONGO Semarang.

Prof.Dr.H.Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (semarang, cv karya abadijaya; 2015)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa; 1989)

Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2005)

Syaifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001,

Cet. III,

Jurnal/skripsi

Farhan *“Pelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”* Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2009)

Achmad Zaki Zamami *“Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Jakarta”*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok, 2012)

Nurul Alvianti Aguswulansari *“Tingginya Angka Perceraian Di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Pada Musim Tembakau”*, Skripsi Fakultas Sosial Dan Humaniora Uin Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2015)

Adhita Anggun Sestyo Putri *“Pemeliharaan Anak (Hadhonah) Akibat Perceraian Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Kota Semarang”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (Semarang, 2011)

Rahmadi Indra Tektona *“Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”*, Jurnal Muwazah Vol.4, No. 1, Juli 2012

Kitab Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam